



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN
SUB UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL ANWAR
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 102935

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.980.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/160 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/26 m2 di MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/65 m2 di GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **366.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR 600 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **12.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **41.885.305**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.399.885.305
III. HUTANG	Rp.	724.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.675.885.305

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.